

Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

The Roles of Village Governments in Handling Broiler Chicken Farming Conflict in Pucanglaban Village Tulungagung Regency

Laily Purnawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tulungagung, Tulungagung, Indonesia

lailypurnawatisip@gmail.com

Diterima: 21 Oktober 2020

Direvisi: 26 Desember 2020

Disetujui: 27 Desember 2020

DOI: [10.35967/njip.v19i2.117](https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117)

Abstrak: Mulai tahun 2010, tren peternakan ayam broiler meningkat sangat signifikan. Semakin meningkatnya permintaan akan hasil peternakan ayam menjadikan perubahan atau pergeseran sumber pendapatan dari yang semula di sektor pertanian ke peternakan. Di awal pendirian kandang, penerimaan masyarakat sangat terbuka tetapi ketika skala peternakan berubah menjadi besar muncullah beberapa keluhan karenanya terutama adanya bau dan lalat. Adanya sikap yang kurang peduli dari peternak ayam broiler membuat masyarakat sedikit geram dan inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penanganan konflik antara peternak ayam dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam menangani konflik antara peternak ayam broiler dengan masyarakat peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel model *snowball sampling*. Berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat bahwa untuk mengatasi konflik yang terjadi, pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator, mediator dan juga regulator sehingga terjadi kesepakatan dengan meminimalkan kerugian antar kedua belah pihak. Untuk ke depannya diharapkan ada aturan yang baku yang dibuat terutama oleh pemerintah desa mengenai prosedur dan tata cara pendirian kandang peternakan sehingga bisa menghindari potensi konflik di antara peternak ayam dengan masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Penanganan Konflik, Peternakan ayam

Abstract: Starting in the 2010s, the trend of broiler chicken farming has increased significantly. The increasing demand for chicken farm produce changes or shifts the source of income from agriculture to livestock. At the beginning of the establishment of the stables, public acceptance was very open but when the scale of the farm became large there were several complaints because of the smell and flies. The lack of caring attitude of broiler breeders makes the community a little angry and this is what causes differences of opinion between them. This research goals were conducted to determine the handling of conflicts between chicken breeders and the surrounding community by the Pucanglaban village government. To find out the strategy of the village government in dealing with conflicts between broiler breeders and the community, researchers used a qualitative descriptive research method with snowball sampling models. Based on the research results, it can be seen that in order to resolve the conflict, the village government acts as a facilitator, mediator and regulator so that an agreement can be reached by minimizing losses between the two parties. In the future, it is hoped that there will be standard rules made especially by the village government regarding the procedures and procedures for establishing a farm cage so that it can avoid potential conflicts between chicken breeders and the community.

Keywords: Village Government, Conflict Handling, Chicken Farming

Pendahuluan

Bidang pertanian maupun perkebunan merupakan mata pencaharian yang cukup populer terutama bagi negara agraris seperti Indonesia. Tidak dipungkiri lagi bahwa kedua bidang tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis bagi laju pertumbuhan perekonomian di negara kita ini. Alasan lain mengapa pertanian dan perkebunan menjadi penyokong ekonomi terutama di daerah – daerah karena hanya di sektor ini yang tidak mensyaratkan ijazah untuk bekerja di dalamnya. Pertanian memegang peranan di dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan sumber pangan juga dengan ekspor usaha hasil pertanian menjadikannya salah satu penyumbang devisa negara (Soekartawi, 2009).

Memberdayakan masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban dari seorang kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, negara memberi tugas kepada kepala desa untuk memberdayakan masyarakatnya terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu wujud pembedayaan ekonomi adalah memberi peluang kesempatan usaha lain di luar pertanian yaitu usaha peternakan (Adlin, 2019).

Adanya kecenderungan permintaan pangan hewani asal ternak seperti daging, telur, dan susu dari waktu ke waktu memiliki tren meningkat yang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, pendapatan, kesadaran gizi, dan perbaikan tingkat pendidikan menjadikan usaha pertanian sedikit tergeser kedudukannya ke usaha peternakan. Hal ini juga dapat mendukung mewujudkan program pemerintah yaitu percepatan pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan dan peningkatan sistem ekonomi kerakyatan (Ulfa et al., 2019).

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia hingga tahun 2016 yang mencapai 254,9 juta jiwa dan peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya protein hewani juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha di bidang peternakan ayam broiler. Usaha peternakan broiler mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan tersebut. Usaha peternakan ayam broiler juga memberikan keuntungan yang cukup besar dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di Indonesia .

Usaha peternakan unggas terutama ayam broiler merupakan usaha yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Usaha peternakan ayam broiler memberikan peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani pada masyarakat dan berbagai keperluan industri khususnya pangan. Adanya kesempatan pasar yang semakin terbuka serta pertambahan penduduk yang semakin pesat membawa hal positif terhadap naiknya jumlah permintaan akan ayam Broiler (Cendrawasih Kadek, Tamim Imron Hadi, n.d.).

Ayam broiler merupakan salah satu jenis ternak unggas yang cukup berkembang di Jawa Timur. Populasi ayam broiler di Jawa Timur menurut data BPS Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 sekitar 30% dari total keseluruhan populasi ayam ras petelur di Indonesia. Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat dan harga telurnya yang relatif murah sehingga mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kawasan peternakan ayam broiler di Jawa Timur yang masih membutuhkan pengembangan. Sesuai data BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2016 bahwa kawasan Kabupaten Tulungagung sangat potensial sebagai daerah peternakan unggas. Umumnya ternak yang dipelihara di daerah kabupaten Tulungagung adalah ayam. Sedangkan tingkat perkembangan populasi ayam broiler di Kabupaten Tulungagung tersebar hampir secara merata namun yang terbanyak adalah di Kecamatan Pucanglaban.

Secara total ternak Ayam Ras meningkat sangat fantastis, yakni 88,06%. Peningkatan yang tinggi tersebut ditopang oleh ternak ayam ras petelur yang meningkat hingga 124%. Peningkatan ini disebabkan permintaan yang cukup tinggi dari daerah-daerah sekitar Kabupaten Tulungagung. Dari kelima kecamatan tersebut populasi ayam terbanyak adalah di Kecamatan Pucanglaban. Kecamatan Pucanglaban merupakan daerah di Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensial tinggi untuk pengembangan usaha ternak ayam broiler. Salah satu perusahaan lokal yang melakukan usaha peternakan ayam adalah Dofir Layer Farm (DLF). *Dofir Layer Farm* merupakan peternakan ayam ras petelur yang terletak di Desa Pucanglaban. Selain memiliki tempat yang strategis, DLF juga mempunyai pasar yang cukup luas.

Adanya perubahan atau pengembangan usaha dari pertanian ke peternakan juga terjadi di Desa Pucanglaban sudah ada beberapa penduduk yang mulai membuka beternak ayam pedaging meski jumlahnya relatif sedikit. Seharusnya usaha ini juga menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Kondisi ini juga didorong oleh tumbuhnya bisnis kuliner yang semakin tumbuh pesat di berbagai tempat.

Dalam waktu yang singkat usaha ayam pedaging atau biasa disebut usaha ayam broiler berkembang pesat. Jenis ayam potong memang menjadi jenis ayam yang banyak peminatnya. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, itik, burung puyuh, babi dan kambing dan lain-lain (Salam et al., 2006).

Dalam kenyataan di masyarakat umum, banyak yang memelihara ternak tetapi bukan merupakan usaha peternakan. Yang diharapkan dari pemeliharaan ternak yang mereka lakukan adalah sekedar hobi, atau mengharapkan telur itik tetapi sesungguhnya biaya pemeliharaannya lebih tinggi karena produksi telurnya di bawah standar. Akan tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sesungguhnya mereka tidak mencari keuntungan materi dalam memelihara hewan ternak. Pemeliharaan ternak tersebut tidak tergolong dalam kegiatan peternakan.

Usaha peternakan ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menampilkan performa produksi yang optimal. Keuntungan yang diperoleh peternakan ayam Broiler (pedaging) merupakan hasil dari penjualan ternak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa produksi (Ratnasari et al., 2015).

Berdirinya usaha peternakan ayam broiler yang ada di Desa Pucanglaban kecamatan Pucanglaban berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Pucanglaban. Dampak yang muncul dengan adanya peternakan tersebut beragam baik dari segi sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat. Respons yang diberikan oleh masyarakat baik positif, negatif, maupun netral. Namun demikian, usaha peternakan ayam broiler juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu diatur oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.

Hal yang paling penting untuk ditanggulangi adalah masalah yang ditimbulkan dari kandang tersebut seperti polusi dan munculnya lalat yang dapat menjadi sumber penyakit, dimana hal itu dapat menimbulkan masalah sosial masyarakat yang ada di

Desa Pucanglaban kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung. Perlu diketahui bahwa peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung yang didirikan di daerah pemukiman warga ini sudah berdiri bertahun-tahun sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Dalam mendirikan peternakan seharusnya pengusaha memiliki pekarangan secara pribadi dan dalam mendirikan kandang peternakan tidak mendirikan kandang ternak di area pemukiman warga karena mendirikan kandang ternak di area pemukiman nantinya akan mengganggu kestabilan atau kegiatan masyarakat dalam kesehariannya dan juga akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat sekitar ketika kandang peternakan sudah mulai dijalankan kegiatannya.

Standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum, usaha berada di daerah yang memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup tinggi, sebaiknya kandang tidak dibangun di daerah rawan kerusakan atau gangguan lingkungan, dari aspek tata letak, sebaiknya posisi kandang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, lokasi kandang mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat. Awal masalah lingkungan merupakan setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang lebih besar, dalam lingkungan yang insidental ataupun rutin, selalu mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak pernah lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitar (fisik maupun non fisik), dari hubungan individu ataupun masyarakat (Kurniawan et al., 2013).

Ironisnya masih ada pemilik modal yang tidak mengikuti standar kelayakan dalam mendirikan kandang ternak ayam broiler. Contohnya usaha peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung kandang usaha ternak ayam yang dekat dengan pemukiman menyebabkan keluhan warga sekitarnya seperti serangan lalat, dan juga polusi udara (bau) yang sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar usaha peternakan ayam broiler. Akan tetapi, adanya peternakan ayam broiler ini bagi beberapa masyarakat merupakan sumber pendapatan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka (Bahri, Artha Bhenu, 2019).

Konflik sosial awalnya akan muncul apabila ada kesenjangan yang tinggi terkait pendapatan antar masyarakat. Belum terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang merata menjadi akar masalah munculnya konflik. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak begitu diperhatikan oleh pemilik usaha juga kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena kerap kali menimbulkan pencemaran lingkungan (Marta, 2016).

Dengan adanya konflik tersebut pemerintah desa ikut andil dalam mengatasi konflik tersebut. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. usaha peternakan broiler selain membawa nilai positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat namun tidak jarang menimbulkan dampak negatif terutama dengan masyarakat sekitar kandang yang biasanya memperoleh dampak langsung dengan keberadaan kandang tersebut. Hal ini tidak jarang bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat. Untuk menyelesaikannya kita perlu tahu dan paham permasalahan yang sedang dipermasalahkan, dan kita harus punya strategi untuk menyasiasi sebuah konflik. Dalam suatu masyarakat sesuatu yang sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial dan sebuah hal yang selalu hadir adalah konflik. Konflik sosial ini menunjukkan adanya percekocokan, perbedaan pendapat, ketegangan yang selalu muncul baik antar pribadi maupun antar kelompok masyarakat (Irwandi, 2017).

Segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia disebut sebagai pemerintah desa. Hal tersebut termuat pada Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa yang

disebut pemerintah desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas – tugasnya. Pemerintah desa inilah yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengelola wilayah tingkat desa.

Kesatuan komunitas dalam wilayah geografis tertentu di mana di antara mereka terjadi relasi yang sangat erat, saling mengenal satu sama lain, memiliki ketergantungan dengan alam secara langsung dan corak kehidupannya cenderung homogen merupakan pengertian desa dilihat dari sudut pandang sosial budaya. Desa digambarkan sebagai masyarakat dengan adat dan tradisi yang kuat, kuatnya ikatan sosial, hidup di sektor agraris, dan tingkat pendidikan relatif rendah (Ulumiyah et al., 2011)

Perselisihan atau konflik muncul akibat persaingan yang dilakukan bisa oleh individu dengan individu atau antar kelompok. Penyebab yang berpotensi menimbulkan hal itu adalah adanya persaingan yang dilakukan secara berlebihan dan atau pada kondisi tertentu, saat keterbatasan sumber daya juga ketidaksesuaian tujuan di antara mereka. Apabila ada salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang membawa akibat adanya penghalangan, penghambatan atau gangguan kepada pihak lain yang terjadi bisa di antara kelompok masyarakat atau bahkan di dalam hubungan pribadi dinamakan konflik (Irwandi, 2017).

Secara bahasa konflik merupakan turunan kata dari bahasa latin yaitu “*con*” dengan arti bersama dan “*fligere*” mempunyai makna berbenturan atau tabrakan. Menurut Webster konflik diartikan perkelahian, peperangan atau perjuangan berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Komaling Candy, Sofia Pangemanan, 2018)

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Ada beberapa hal yang bisa berpotensi menghasilkan konflik menurut Soekanto Soekanto, antara lain adalah :

1. Di antara individu-individu terdapat perbedaan baik pendirian maupun perasaan yang dilahirkan dari bentrokan di antara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Selain beberapa penyebab potensial di atas, penyebab konflik menurut Diana Francis juga bisa timbul karena adanya :

1. Komunikasi: Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap
2. Struktur: Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka

3. Pribadi: Ketidaksiharian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Untuk menyelesaikan konflik, ada lima cara mendasar yang dilakukan untuk mengatasi konflik, yaitu :

1. Pengenalan: Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).
2. Diagnosis: Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
3. Menyepakati sebuah solusi: Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.
4. Pelaksanaan: Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.
5. Evaluasi: Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi (Irwandi, 2017).

Ada beberapa penelitian tentang penanganan konflik dan peternakan ayam broiler. *Pertama*, penelitian oleh Taufik Hidayat yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Daerah Kabupaten Kolaka Utara memperoleh kesimpulan di dalam menyelesaikan konflik pemerintah kabupaten Kolaka Utara mengupayakan konsiliasi yaitu mendamaikan kedua pihak yang bertikai dan dengan mengikutsertakan perwakilan dari tokoh masyarakat dari dua desa tersebut sehingga bisa ditemukan jalan tengah.

Kedua, penelitian oleh D. Lesmana dkk. dengan judul Konflik Pembangunan Peternakan Ayam di Kecamatan Gunung Kencana menitikberatkan pada adanya gerakan sosial oleh masyarakat yang menolak adanya pendirian peternakan ayam. Di mana hal ini didukung oleh Himpunan Mahasiswa Gunung Kencana dengan alasan tidak memiliki izin dan melanggar Peraturan Daerah setempat.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peranan pemerintah desa dalam menangani konflik peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya penelitian ini bertujuan nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran dan juga menganalisa mengenai upaya apa saja yang diambil oleh pemerintah desa dalam menangani konflik tersebut.

Metode

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif agar bisa memberikan penggambaran yang jelas dan rinci mengenai peristiwa yang terjadi. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang menurut Djunaidy Ghony (2016) untuk bisa memberikan jawaban dan gambaran yang utuh dan menyeluruh dari sudut pandang yang holistik mengenai strategi apa saja yang diupayakan oleh pemerintah Desa Pucanglaban dalam menangani konflik antara peternak ayam broiler dengan masyarakat sekitarnya (Purnawati, 2019)

Sumber data yang dipakai adalah hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepala desa, perangkat desa, peternak dan beberapa masyarakat yang terkena dampak limbah peternakan ayam broiler tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa

Pucanglaban kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung karena kecamatan ini adalah salah satu tempat peternakan ayam broiler yang terbesar di Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumenasi di lapangan. Analisis data menggunakan analisa data kualitatif yang dilakukan secara interaktif .

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung merupakan masyarakat desa yang tinggal di daerah pegunungan dan mayoritas mata pencaharian sebagai petani yaitu bekerja di sawah atau ladang. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil sawah atau kebun yang mereka garap, selain itu juga ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha dan lainnya namun hanya sedikit, salah satunya yaitu masyarakat yang menjadi pengusaha adalah pengusaha ternak ayam broiler yang didirikan di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan lokasi dekat dengan pemukiman.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Indonesia pada bidang usaha peternakan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005-2006 memperoleh pendapatan per kapita 364.169,3 menjadi 433.223,4 kemudian dari tahun 2006-2007 mengalami peningkatan lagi menjadi 541.931,5 semakin meningkat lagi pada tahun 2008 yaitu 716.065,3 dan meningkat kembali pada tahun 2009 yaitu 858.252,0 tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 760.760,5. Salah satu masyarakat yang mendirikan peternakan di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ini tetap memberikan kontribusi masyarakat di desa setempat.

Usaha peternakan ayam ras pedaging merupakan salah satu usaha peternakan yang memberikan kontribusi terbanyak dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. Berdasarkan data statistik peternakan BPS Pusat tahun 2018, pada tahun 1970 kontribusi daging unggas hanya sebesar 15%, tetapi pada tahun 2017 produksinya telah mencapai 2,1 juta ton atau 66,34% terhadap produksi daging secara keseluruhan. Usaha ternak ayam ras pedaging di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 sebanyak 1.344.191.000 ekor dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 1.698.368.000 ekor.

Saat ini jumlah penduduk di Desa Pucanglaban berdasarkan data BPS Kabupaten Tulungagung 2016 mencapai 5.101 jiwa. Sebagian besar penduduknya tamatan SD dengan jumlah 3822 jiwa, sedangkan yang tidak tamat SD mencapai 329, sisanya tamatan SMP, SMA, dan Sarjana. Karena mayoritas hanya tamatan SD, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Adapun hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, ketela pohon & rambat, sayuran, dan cabai. Seiring berjalannya waktu saat ini sudah banyak yang merambah ke sektor peternakan, salah satunya peternakan ayam broiler.

Keadaan masyarakat Desa Pucanglaban pada dasarnya hidup cukup rukun dalam satu lingkungan, masyarakat saling berinteraksi dengan baik satu sama lainnya, saling membentuk kelompok untuk bersosialisasi. Pada dasarnya masyarakat memiliki sifat tenang saling menjaga martabat tidak bersifat kontra jika tidak ada sebabnya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan masyarakat pasti sebelumnya meminta masyarakat lainnya membicarakan baik-baik tidak langsung melakukan tindak kekerasan. Seperti halnya keberadaan kandang ayam di lingkungan masyarakat ini, efek yang disebabkan dari kandang ayam ini adalah membeludaknya lalat dan bau yang tidak sedap sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kesehatan.

Masyarakat yang mempunyai usaha rumah makan merasa tidak nyaman dan rugi karena hal ini. Inilah yang biasa di jadikan alasan oleh pihak-pihak yang tidak

menginginkan adanya kandang ayam di lingkungan masyarakat, menyebabkan terganggunya sarana pernafasan akibat bau dari kotoran ayam dan kesehatan. Jika tidak langsung ditanggapi masyarakat mungkin saja membentuk suatu kelompok yang menentang adanya kandang ayam di lingkungan masyarakat.

Pada awal keberadaannya, masyarakat cenderung menunjukkan suatu sikap terbuka terhadap hal-hal baru yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan secara finansial meskipun sebelumnya belum pernah ada usaha ternak semacam itu seperti usaha ternak ayam broiler. Tetapi dilain sisi masyarakat belum mengetahui dampak limbah yang dihasilkan oleh peternakan ayam broiler lebih besar dari pada peternakan yang telah ada sebelumnya.

Usaha ternak ayam broiler berbeda dengan peternakan warga pada umumnya karena menimbulkan dampak bau dan lalat. Hal ini seketika memicu pandangan normatif di mana pihak peternak adalah satu-satunya pihak yang mengetahui atau memiliki cara untuk mengendalikan dampak limbah peternakannya serta memiliki peranan sosial untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Pandangan normatif tersebut juga tidak terlepas dari bentuk dan pengalaman peternakan masyarakat yang terbatas pada bentuk peternakan keluarga berskala kecil dan tradisional saja. Sedangkan pada kenyataannya, telah hadir di tengah kehidupan mereka suatu peternakan yang berskala besar dan menimbulkan dampak negatif (Sulaeman et al., 2019).

Hal tersebut sebagaimana dikatakan bapak Bambang selaku tokoh masyarakat dalam sebuah kutipan wawancara dengan peneliti mengatakan sebagai berikut:

“jujur saja saya sangat terganggu dengan bau dan lalat yang ditimbulkan dari adanya peternakan ini. Terutama di musim penghujan, bau dari kotoran ayam ini sangat menyengat. Belum lagi apabila berbarengan musim buah, lalat akan sangat banyak”.(wawancara hari Kamis, 23 Juli 2020 pukul 19.00 WIB)

Pernyataan ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Sulastri yang mempunyai usaha warung makanan :

“baunya itu lho yang membuat kita jengkel. Orang yang mau beli di warung saya akhirnya tidak nyaman mau makan di tempat padahal jarak warung saya dengan kandang termasuk agak jauh tapi tetap saja terbawa angin sampai kesini. Kalau lalat tidak sampai di warung saya ini untungnya”. (wawancara pada hari Kamis, 23 Juli 2020 pukul 10.00 WIB)

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Gambaran Konflik Peternak Ayam Broiler dengan Masyarakat Desa Pucanglaban Pemetaan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik peternakan, Desa Pucanglaban di antaranya:

a. Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi peternakan ayam broiler. Terganggunya masyarakat yang diakibatkan oleh bau yang menyengat dari peternakan tersebut dan lalat yang senantiasa menyerbu rumah warga setiap menjelang masa panen ayam broiler dan musim-musim tertentu. Beberapa pihak yang terkena dampak adanya peternakan Ayam broiler yaitu:

1) Masyarakat Pengguna Jalan

Terjadinya konflik karena kondisi jalan yang cepat rusak dan berlubang yang diakibatkan oleh trek- trek pengangkut sarana dan prasarana keperluan dari pihak peternakan ayam broiler. Dampak negatif yang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi lambat laun kondisi jalan yang rusak dan berlubang akan menghambat maupun rentan terjadi kecelakaan khususnya tukang ojek yang membawa muatan tidak jarang kondisi jalan di Desa Pucanglaban hanya berdasar tanah biasa, akan tetapi dengan adanya kendaraan besar bermuatan berat yang melintasi jalan tersebut membuat kondisi jalan semakin memprihatinkan di kala musim penghujan.

2) Masyarakat yang membuka Warung Makan

Dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dengan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh lalat dan bau dari peternakan ayam broiler yang senantiasa menyerbu warung- warung warga pada musim pembibitan, musim panen maupun musim-musim tertentu Banyak masyarakat yang membuka warung makanan kecil-kecilan di depan rumahnya maupun dekat dengan lokasi sekolah. Selain adanya gangguan polusi dan lalat yang berasal dari peternakan ayam broiler, pedagang merasa sangat terganggu dan dirugikan karena lalat yang berasal dari peternakan ayam broiler tersebut menyerbu rumah-rumah pedagang. Sehingga mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli, salah satunya pembeli menjadi berkurang karena merasa tidak nyaman dan jijik, makanan pedagang pun menjadi kelihatan kumal dan tidak tahan lama

3) Pegawai Sekolah, Murid, dan Orang Tua Murid

Ada beberapa kandang yang letaknya di seberang jalan sekolah SMP dan di belakang sekolah SD maupun sekolah TK. Bau dan lalat yang berasal dari peternakan ayam broiler yang letaknya tidak jauh dari fasilitas sekolah kira-kira kurang lebih 50 meter, sehingga dampak secara langsung ditanggung oleh warga sekolah sangat mengganggu aktivitas sekolah, salah satunya mengganggu kenyamanan saat belajar- mengajar, mengurangi konsentrasi murid-murid saat belajar terutama pada saat musim pembibitan dan musim panen ayam broiler. salah satu warga sekolah (kepala sekolah) sudah menyampaikan langsung keluhan tersebut terhadap pemilik peternakan, akan tetapi pemilik peternakan sama sekali tidak menghiraukan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bu Yeti salah seorang guru TK di Desa Pucanglaban adalah sebagai berikut :

“Dari adanya kandang ayam di lingkungan sekolah ini sangat mengganggu proses belajar mengajar, karena lalat yang ada selalu menghinggapi setiap barang yang ada, terlebih jika ada anak yang membawa makanan ke dalam kelas, hal inilah yang biasa menjadi kumpulan tempat lalat. Selain itu juga kebersihan kelas, jika ada ceceran jajan atau minuman ke lantai itu kan menjadi sarang lalat. Hal itulah yang menjadi pemandangan bagi kami dan anak-anak setiap musim panen berlangsung.” (wawancara pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 09.00 WIB)

Inti dari kasus yang memunculkan konflik di antaranya:

- a) Polusi udara yang diakibatkan oleh bau dan lalat sangat mengganggu aktivitas
- b) Terganggunya penggunaan jalan karena kondisi jalan yang semakin buruk.
- c) Penjualan pedagang makanan yang semakin menurun akibat bau dan lalat.
- d) Terganggunya proses pendidikan yang disebabkan oleh polusi udara dari peternakan.

Dari keempat kasus tersebut penyebab yang menimbulkan konflik adalah jarak peternakan ayam broiler dengan pemukiman masyarakat tergolong dekat antara 50-250 Meter, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu aktivitas warga.

Mengacu dari beberapa kasus di Desa Pucanglaban berdasarkan dari laporan dan keluhan masyarakat ke kantor desa, di mana yang sudah ditindak lanjuti oleh kepala desa dengan mengundang masyarakat dengan pemilik peternakan untuk menyelesaikan pertentangan antara kedua belah pihak, hasil dari kebijakan yang disepakati antara kedua belah pihak yang berkonflik senantiasa mengkomunikasikan secara langsung dengan kekeluargaan jika ada hal-hal yang dianggap mengganggu.

Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan Bu Paisah, salah satu anggota BPD Desa Pucanglaban, mengatakan bahwa:

“adanya kandang ayam ini sebenarnya menguntungkan mas, tiap panen selalu dapat jatah dari pemilik ternak, sebagai gantilah ketika banyak lalat yang muncul saat panen, selain itu juga dapat mengurangi pengangguran, tapi ada yang disayangkan yaitu limbah seharusnya dibersihkan, agar tidak menimbulkan penyakit dan menjadi masalah”.
(wawancara pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 19.00 WIB)

Keberadaan kandang ayam ini memiliki keuntungan tersendiri buat dirinya, yang mana menurut ia dengan adanya kandang ayam ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya, peternak mengambil jasa pekerja dari masyarakat sekitar, hal ini menurutnya sangat menguntungkan. Sedangkan dari sisi lain, juga menyayangkan dengan pembuangan limbah kotoran dari kandang ayam tersebut. Dengan hal ini Bu Paisah menghimbau kepada pemilik kandang ayam agar mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi, baik dari bau, lalat dan pencemaran lainnya. Menurutnya tanggapan dari peternak yang bersangkutan kurang memuaskan karena sebagian ada yang meremehkan masalah yang ada dan bersifat acuh tak acuh.

Dengan hal ini jika peternak kandang sendiri bersifat acuh tak acuh yakni masyarakat sekitarlh yang merasa sangat dirugikan. Namun sejauh ini peternak mencoba membuat saluran pembuangan kotoran sendiri dan mengatasi limbah kotoran lainnya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bu Sulikah selaku warga masyarakat dalam sebuah kutipan wawancara dengan peneliti mengatakan sebagai berikut:

“kandang ayam ini sangat menguntungkan, masyarakat yang rumahnya dekat dengan kandang biasanya dikasih ayam 1 ekor tiap kali panen, tapi masalah dampaknya tidak bisa dihindarkan seperti bau dan lalat yang selalu muncul, ini sangat mengganggu. Malah ada yang ditanya terkait hal ini peternak ada yang merespons sinis, meski tidak semua mas. Apa lagi air sering habis karena untuk konsumsi peternakan”.(wawancara pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 07.00)

Sejauh ini warga menangani masalah yang ada dengan pemberian obat terhadap lalat. Tanggapan yang diterima pun sama dengan keterangan sebelumnya, yakni sikap acuh tak acuh dari beberapa pemilik kandang, namun tidak semua pemilik kandang memiliki sifat tersebut, melainkan banyak dari pemilik kandang yang mampu merespons baik masyarakat soal keluhan dari masyarakat tersebut.

Untuk menangani konflik yang terjadi antara peternak ayam broiler dengan masyarakat sekitarnya maka pemerintah Desa Pucanglaban memiliki beberapa strategi untuk mengatasinya. Berdasarkan data yang didapat melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Pucanglaban, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Pucanglaban sangat berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik antara peternakan ayam broiler dengan masyarakat, Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan

tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban antara lain sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai Fasilitator (memberikan dukungan)

Peran pemerintah Desa dalam hal kaitannya dengan usaha peternakan ayam broiler sangat signifikan, hal ini terlihat saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maduki selaku Kepala Desa Pucanglaban, sebagai berikut:

“saat ini memang banyak dari warga kami yang sedang gandrung dengan jenis usaha ayam pedaging (broiler), saya sangat senang dan mendukung kegiatan tersebut, karena sedikit banyak akan menumbuhkan tingkat perekonomian dan juga pendapatan dari warga, ditambah juga mengurangi pengangguran.” (wawancara pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 10.30 WIB).

Dari wawancara di atas terlihat bahwa kepala Desa sangat senang dengan adanya usaha peternakan ayam broiler ini, karena dengan adanya peternakan ayam ini selain menambah pendapatan juga mengurangi pengangguran dari warga Desa Pucanglaban, pungkasnya.

Lebih lanjut Bapak Maduki selaku Kepala Desa Pucanglaban dalam sebuah kutipan wawancara dengan peneliti mengatakan sebagai berikut:

“kami dari pemerintah Desa sangat mendukung dengan usaha yang dilakukan warga, namun yang perlu digaris bawahi yaitu para peternak juga harus memperhatikan efek lingkungan sekitar, oleh karenanya pemerintah desa sudah sering melakukan sosialisasi pengelolaan limbah peternakan, dan lain sebagainya, agar nantinya tidak terjadi konflik antara pemilik kandang dengan masyarakat sekitar.” (wawancara pada hari Jumat, 24 Juli 2020 pukul 08.00 WIB)

Peran pemerintah desa sangat terlihat sampai halnya mengadakan sosialisasi izin pendirian usaha peternakan ayam broiler.

2. Bertindak sebagai mediator

Sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia (Wartiharjono, 2017). Seperti halnya yang terjadi di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, seperti yang dikemukakan di awal bahwa pendirian usaha peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban ini tidak lantas berjalan mulus begitu saja, ada beberapa permasalahan yang timbul setelah adanya peternakan, seperti halnya yang dikemukakan saat wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sarno Kusmianto salah satu perangkat Desa Pucanglaban, sebagai berikut:

“iya itu, setelah adanya kandang-kandang ayam, tidak sedikit warga yang mengeluh dengan bau yang timbul dari limbah peternakan, dan banyaknya lalat saat musim panen.” (wawancara pada hari Jumat, 24 Juli 2020 pukul 09.00 WIB)

Ternyata banyak warga yang mengeluhkan terkait bau yang sangat menyengat dan lalat yang senantiasa menyerbu rumah-rumah warga saat musim panen. Seperti yang diungkapkan Bapak Masduki selaku Kepala Desa saat melakukan wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan mediasi terkait permasalahan ini dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pengusaha ternak dengan warga sekitar.” (wawancara pada hari Jumat, 24 Juli 2020 pukul 08.00 WIB)

Ada 2 kali pertemuan sebagai upaya mediasi di antara pihak yang berkonflik yang diprakarsai oleh pemerintah Desa Pucanglaban yang bertempat di balai desa dan di rumah bapak Kepala Desa. Mediasi ini selain mendatangkan peternak dan masyarakat sekitar juga mendatangkan dari pihak MUSPIKA kecamatan Pucanglaban dan dari dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang dimintai saran. Seperti hasil wawancara dengan bapak Maduki selaku Kepala Desa Pucanglaban :

“ kami dari pemerintah desa tidak tinggal diam saja menghadapi konflik antara peternak dan masyarakat. Karena kalau tidak segera ditindaklanjuti dan diselesaikan bisa membuat kondisi desa tidak kondusif. Di satu sisi. Kami senang dengan adanya usaha peternakan ini maka pendapatan masyarakat menjadi naik akan tetapi di sisi lain memang limbah yang ditimbulkan harus juga dicarikan solusi maka dari itu pada saat mediasi kami mendatangkan juga dari dinas lingkungan hidup yang mengerti terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan usaha peternakan ayam ini. Kami berharap jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak jadi harus diputuskan secara adil. (wawancara pada hari Jumat, 24 Juli 2020 pukul 08.00 WIB)

Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai berdasarkan pendapat Abdullah Idrus adalah melalui mekanisme mediasi. Proses penyelesaian perselisihan (*disputes processed*) yang dilakukan melalui jalur *non judicial* dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) (Akib, 2010).

Salah satu kewajiban kepala desa adalah berperan sebagai mediator apabila terjadi perselisihan antara warga masyarakatnya. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Bahri, Artha Bhenu, 2019)

Dilema yang dialami masyarakat Desa Pucanglaban akhirnya diselesaikan dengan cara musyawarah oleh pemerintah Desa (sebagai mediator) antara peternak ayam broiler dan warga Masyarakat, hingga akhirnya membentuk suatu tata aturan baru yang kelak akan menjadi patokan umum atau kerangka normatif bagi para peternak dalam menjalani aktivitas peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban. Aturan yang terbentuk dari peristiwa musyawarah, mengantarkan masyarakat pada suatu peristiwa formulasi norma-norma sosial baru yang bisa mengubah perubahan yang tidak diinginkan seperti dampak bau menjadi perubahan yang bisa dikehendaki secara umum (Shohibuddin, 2016)

Bahkan jika dipahami lebih lanjut, kerangka normatif yang terdapat dalam peraturan tersebut juga mempengaruhi pandangan umum terhadap usaha ternak ayam broiler maupun atribut peranan yang harus dijalankan oleh seorang peternak ayam broiler. Sehingga di samping secara manifes peraturan tersebut berguna untuk menciptakan suatu keadaan tertib sosial, secara laten masyarakat telah mempersiapkan instrumen kebudayaan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan usaha ternak ayam broiler di masa depan melalui tata

peraturan tersebut. Sehingga konflik-konflik sosial bisa ditangani secara lebih cepat (Maulana et al., 2014)

3. Bertindak sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Pucanglaban dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat (Hidayat, 2017).

Peran seorang pemimpin juga sangat besar terhadap keberhasilan upaya rekonsiliasi konflik. Kepiawaian seorang pemimpin mengembangkan organisasinya yang dipimpinya memampukannya mengelola konflik atau persoalan yang muncul dimasyarakat. Hal ini merupakan perubahan yang di sengaja, sehingga diperlukan kemampuan dan ketrampilan khusus seorang pemimpin disertai komitmen yang kuat (Khotami, 2020).

Dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dalam kaitannya dengan usaha peternakan ayam broiler, agar tidak berujung konflik dengan masyarakat. Melihat inti permasalahan adalah akibat limbah peternakan yang menimbulkan bau dan juga banyak memunculkan lalat saat musim panen tiba, maka pemerintah Desa Pucanglaban menerapkan kebijakan pengetatan perizinan, di mana pemberian izin pendirian kandang dilakukan secara selektif. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap peternakan ayam broiler dengan kewajiban memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan agar terhindar adanya konflik.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di tengah masyarakat merupakan akibat kelalaian dari pihak peternakan yang kurang memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, hal ini direspons oleh pemerintah desa selaku kepala pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dilema yang dialami masyarakat Desa Pucanglaban pun akhirnya diselesaikan oleh pemerintah Desa dengan cara musyawarah oleh Pemerintah Desa (sebagai mediator) dan peternak ayam broiler serta warga Masyarakat, hingga akhirnya membentuk suatu keputusan, yang kemudian menjadi tata aturan baru yang kelak akan menjadi patokan umum atau kerangka normatif bagi para peternak dalam menjalani aktivitas peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban.

Aturan yang terbentuk dari musyawarah sebagai hasil mediasi pemerintah desa, mengantarkan masyarakat pada suatu formulasi norma sosial baru. Di sisi lain, terjadi perbaikan atas kualitas udara yang semula terpolusi bau kini udaranya menjadi lebih segar dan dapat diterima secara umum. Maknanya, peran pemerintah desa sebagai regulator telah berfungsi. Diharapkan tersedia aturan baku mengenai pendirian kandang ternak ayam dan peternakan lainnya, terutama untuk mereduksi dampak sosial dan lingkungan.

Aturan baru yang dibuat pemerintah desa terkait pendirian kandang adalah jarak antara kandang dengan pemukiman minimal 500 meter. Peternak harus mengolah limbah peternakan mereka misalnya wajib memberi obat pada kotoran ayam agar tidak berbau. Dan yang terpenting adalah harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya.

Konflik yang terjadi antara peternak ayam broiler dengan masyarakat ini akhirnya bisa diselesaikan oleh pemerintah desa. Ke depannya, pemerintah desa akan membuat persyaratan bagi peternak yang akan mendirikan kandang yang dituangkan di dalam peraturan desa sehingga apabila terjadi konflik pemerintah desa sudah mempunyai paung hukum untuk menyelesaikannya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPPM Universitas Tulungagung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Kepala Desa beserta perangkat desa di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, Masyarakat Desa Pucanglaban, para narasumber, dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Semoga Penelitian ini bermanfaat dan mampu memberikan stimulan kepada peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai perspektifnya.

Daftar Pustaka

- Adlin. (2019). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 117–128.
file:///D:/proposal/Pengembangan_Political_Will_Pemerintah_Desa_Member.pdf
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Bahri, Artha Bhenu, P. W. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Kewirausahaan Pertanian Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(2), 82–94.
<https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1313>
- Cendrawasih Kadek, Tamim Imron Hadi, A. K. S. (n.d.). Ayam Broiler Dengan Masyarakat. 10(1), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot>
- Hidayat, T. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Of Government*, 3(1), 241–265.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/JOG>
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat ., *JISPO*, 7(2), 24–41.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
- Khotami. (2020). INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1).
<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN>
- Komaling Candy, Sofia Pangemanan, N. K. (2018). PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLOAANG MONGONDOW. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/index>
- Kurniawan, M. F. T., Darmawan, D. W. I. P., & Astiti, N. W. S. R. I. (2013). *Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Tabanan The Development Strategy of Agribusiness Layer Poultry in Tabanan Regency Pendahuluan*. 1(2), 53–66. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis>
- Marta, A. (2016). Potret Konflik Sosial Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 44.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3220>
- Maulana, Y., Mauludin, Y., & Gunadhi, E. (2014). Analisis Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) Dengan Pola Kemitraan (Studi Kasus Di Peternakan Bu Lilis

- Rancamidin, Cibodas). *Jurnal Kalibrasi*, 12(1), 66.
<http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/kalibrasi/article/view/275>
- Purnawati, L. (2019). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung). In *Jurnal PUBLICIANA* (Vol. 11, Issue 1, pp. 55–71).
- Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis pendapatan peternak ayam broiler pada sistem kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47–53.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaaj/article/view/8474>
- Salam, T., Muis, M., Alfian, D., Rumengan, E. N., Sekolah, D., Penyuluhan, T., Gowa, P., & Sekolah, A. (2006). ANALISIS FINANSIAL USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER POLA KEMITRAAN The finansial analyse of broiler chicken by partner pattern. *Jurnal Agrisistem*, 2(1), 32–39. <https://ejournal.polbangtan-gowa.ac.id/index.php/J-Agr>.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021>
- Soekartawi. (2009). *e-AGRIBISNIS: TEORI DAN APLIKASINYA* (Vol. 2007, Issue Snati 2007).
- Sulaeman, M. M., Mauludin, A., Sulistyati, M., Nurlina, L., & Yunasaf, U. (2019). DAMPAK EKSKLUSI SOSIAL DAN MODEL PEMBERDAYAAN PETERNAK The Impact of Social Exclusion and The Farmer Empowerment Model. 1(1), 19–30.
<https://jurnal.unpad.ac.id>.
- Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Wicaksono, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 54–63. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7806>
- Ulumiyah, I., Juli, A., Gani, A., & Mindarti, L. I. (2011). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 890–899.
- Wartiharjono, S. (2017). Potensi konflik dan pembentukan modal sosial: belajar dari sebuah desa transmigran di Kalimantan Timur. Conflict potential and social capital construction : a case study of a transmigrant village in East Kalimantan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30, 84–93.